

# Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID)

*(Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*

Oleh:

**Nur Amiril (232020100183)**

Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP., M.AP

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

# Pendahuluan

## SISTEM INFORMASI DESA (SID)

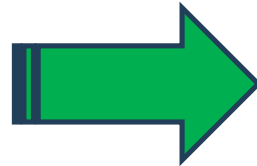
Era modern didorong oleh teknologi dan transformasi digital sebagai acuan dalam melakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan karena adanya globalisasi. Globalisasi memunculkan gagasan baru yang kemudian disebarluaskan kepenjuru dunia untuk di tiru dan menjadi kiblat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Pada pelaksanaan e-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras adalah tersedianya pusat informasi kepada masyarakat melalui website desa dengan selalu update terkait data penduduk, data sosial, informasi kegiatan desa dan data keuangan desa.



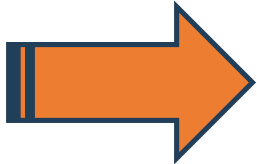
# Pendahuluan

**Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun  
2014**



pasal 27 huruf d yang berbunyi Pemerintah Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

**Peraturan Presiden  
Nomor 95 Tahun  
2018**



**Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi** adalah Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.

# Pendahuluan



Perdes No 07 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

SK No 36 Tahun 2021 Tentang Pembentukan PPID Desa Sugihwaras.

# Penelitian Terdahulu

oleh Al Ridho Saqi'an Yuliansyah pada tahun 2023

"Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) Di Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik".

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penerapan Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) di Desa Gadingwatu memiliki manfaat sebagai lembaga pelayanan publik yang bertugas memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat, yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi penting. Beberapa faktor seperti kepatuhan, daya tanggap, pelayanan tepat waktu, dan kemampuan menerima pelayanan mandiri, berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. Namun, masyarakat tidak selalu efektif dalam memberikan tanggapan terkait implementasi Aplikasi SID di Desa Gadingwatu. faktor usia perangkat desa juga yang menyebabkan penurunan kemampuan.

oleh Dina Ayu Sindiana di tahun 2023

"Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon",

penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Dukuhsari belum maksimal, terutama pada aspek pelatihan dan koordinasi. Namun, anggaran dan SOP yang baik telah tersedia. Evaluasi rutin dilakukan tiap 3 bulan untuk memperbaiki kekurangan. Perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk pengelola SID agar menghadapi permasalahan teknis dan non-teknis. Disamping itu sosialisasi yang kurang pro aktif kepada masyarakat, sehingga informasi terkait Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Dukuhsari kurang optimal.

Oleh Tholib Hariono dkk Pada tahun 2021

"Penerapan Website Opensid untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa Banjarsari."

Penelitian ini menggunakan jenis metode pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Banjarsari, Kabupaten Jombang berhasil memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur Desa terkait Sistem Informasi Desa (SID). Selain itu, melalui website desa, kegiatan ini dapat memudahkan aparatur Desa dalam menyebarkan informasi Desa secara cepat dan menyeluruh, serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Namun kendalanya yang dihadapi adalah kurang tepat dalam segi perintah tugas sebagai operator Sistem Informasi Desa. Sehingga Implementasi Sistem Informasi Terbuka (OpenSID) tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan perangkat desa yang diberikan kewenangan untuk mengelola OpenSID tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

# Metode



## Jenis Penelitian :

Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif



## Lokasi Penelitian :

Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



## Fokus Penelitian :

memberikan gambaran dan menganalisis bagaimana pemerintahan desa Sugihwaras menerapkan e-Government melalui Sistem Informasi Desa (SID).



## Teknik Pengumpulan Data:

Observasi  
Wawancara  
Dokumentasi



## Teori Penelitian :

Menggunakan Teori Kebijakan Edward III dengan 4 Variable : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

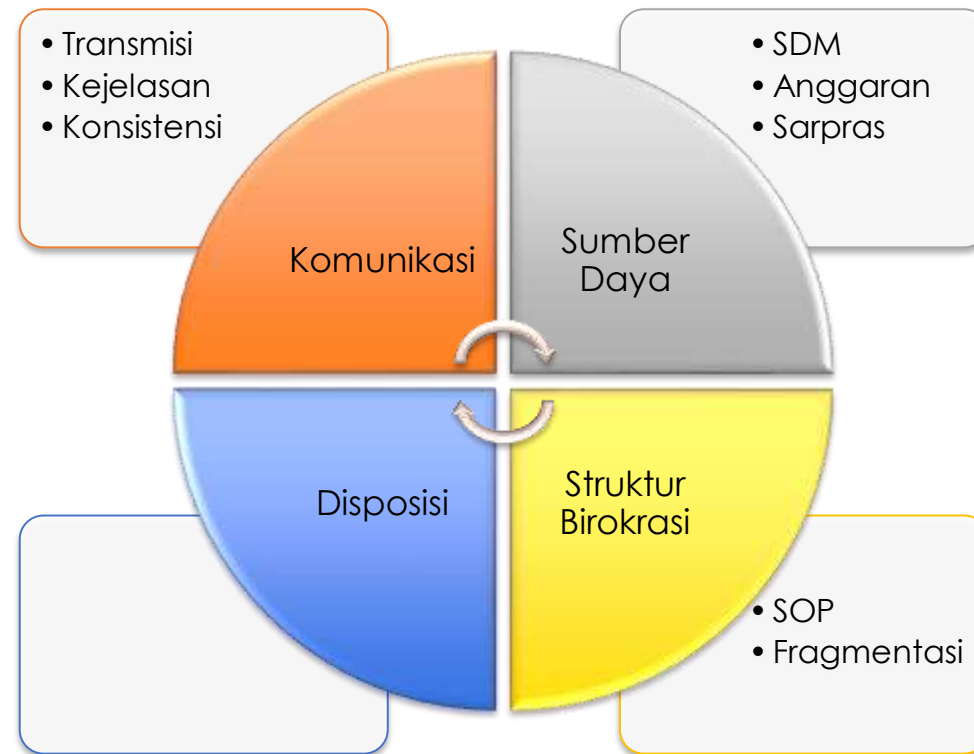


## Sumber Data:

Data Primer  
Data Skunder

# Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui hasil implementasi E-Government Melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo peneliti menggunakan teori model George Edward III yang terdiri dari 4 indikator sebagai berikut:



# Hasil dan Pembahasan

## Komunikasi

Pada **Dimensi Transmisi** didapatkan hasil bahwa pemahaman perangkat desa terkait Sistem Informasi Desa (SID) tidak sepenuhnya memahami, Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras yang menyampaikan bahwa tidak semua Perangkat Desa memahami Sistem Informasi Desa (SID). Kejadian ini bisa menimbulkan kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan manfaat sesungguhnya Sistem Informasi Desa yaitu sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.

Pada **Dimensi Kejelasan** operator Sistem Informasi Desa belum memahami semua fitur yang ada di tampilan dashboard, Namun masih ada Sekretaris Desa yang menguasai seluruh fitur pada Sistem Informasi Desa. Sehingga Kejelasan informasi bisa dirasakan oleh masyarakat, Hal ini ditemukan dari hasil wawancara dengan ketua RT. 04 dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lilik Maslikhah Tahun 2023 dengan judul "*Digitalisasi Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Sugihwaras*" dengan pernyataan bahwa Keberhasilan implementasi digitalisasi di Desa Sugihwaras telah mengubah paradigma pelayanan publik tradisional menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada **Dimensi Konsistensi** Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Desa Sugihwaras menunggu konsistensi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, didapatkan hasil wawancara dengan Kaur TU & Umum menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek hanya 2 kali dalam setahun. Hal ini mampu mempengaruhi konsistensi Pemerintah Desa Sugihwaras selaku Implementor Sistem Informasi Desa (SID) dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.



# Hasil dan Pembahasan

## Sumber Daya

**Dimensi Sumber Daya Manusia** diketahui bahwa Pemerintah Desa menunjuk 2 Operator dari unsur seketariat yaitu Kaur TU & Umum dan Sekretaris Desa, dari segi pendidikan dan pengetahuan didapatkan bahwa segi SDM sudah memadai. Tinggal bagaimana kedua operator tersebut mencari informasi sebanyak mungkin terkait fitur dan menu SID, Hal ini diperkuat dengan temuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dina Ayu Sindiana di tahun 2023 yang berjudul "*Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon*" Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Pemerintah Desa Dukuhsari belum maksimal, terutama pada aspek pelatihan dan koordinasi

**Dimensi Anggaran** untuk hasil anggaran didapatkan bahwa untuk pengelolaan SID di Desa Sugihwaras di anggarkan sebesar Rp. 5jt per tahun dari sumber dana Bagi Hasil Pajak, Namun untuk honor operator belum dialokasikan anggaran yang bisa menimbulkan turunnya motivasi bagi operator. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Chepy Bagustian Sonjaya, tahun 2023 dengan judul "*Pengembangan Website Desa Sebagai Media Informasi Masyarakat Desa Segar Jaya*" diperlukan juga penyediaan anggaran untuk honor pengelola agar mampu memberikan motivasi dan kemampuan pengelola bisa lebih ditingkatkan lagi.

**Dimensi Sarana dan Prasarana** Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Desa Sugihwaras sudah menyediakan komputer dan jaringan internet yang memadai untuk mendukung Implementasi Sistem Informasi Desa (SID), Hal ini di dukung dengan pernyataan Kepala Desa Sugihwaras bahwa Pemerintah Desa sangat mendukung untuk pelaksanaan SID dengan menyediakan peralatan sebagai penunjang sesuai dengan kebutuhan.

# Hasil dan Pembahasan

## Disposisi

Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari :

No	Nama Aplikasi	Penanggungjawab (Kaur/Kasi/Kasun)
1	Siskcudea	kaur keuangan
2	Sipades	kaur tu
3	Prodeskel	kasipem desa
4	Epedcskel	kasipem desa
5	Sipraja	kasi pelayanan
6	SID	Sekdes
7	IDM	kasi kesra
8	SDG's	kasi kesra
9	Plavon	kasi pelayanan
10	Simanis	kasi pelayanan
11	DDC	kaur perencanaan
12	Sipede	kaur tu
13	Simpel	kaur perencanaan
14	SIKS-NG	kasi kesra
15	Ebuddy	kaur tu
16	Omspan	kaur keuangan
17	Rupabumi	kasipem desa
18	desa.go.id	kasipem desa
19	portal data kinerja	Sekdes
20	Sipd	kaur perencanaan
21	e skm	kasi pelayanan
22	Puskessos	Kasi keara

Sumber: Perbup Sidoarjo Nomor 98  
Tahun 2022

Berdasarkan gambar disamping bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 mengatur bahwa Sekretaris Desa adalah Penanggung Jawab Sistem Informasi Desa (SID). Desa Sugihwaras sudah menugaskan Sekretaris Desa dan Kaur TU & Umum sebagai operator, Namun hasil wawancara dengan Ibu Fita selaku Kaur TU & umum didapatkan bahwa kesibukan sekretaris desa menjadi hambatan dalam implementasi SID dikarenakan Kaur TU & Umum belum sepenuhnya memahami Fitur dan Menu pada Website Sistem Informasi Desa. Sikap pelaksana disini berperan penting demi keberhasilan Implementasi Egovernment melalui Sistem Informasi Desa di Desa Sugihwaras.

# Hasil dan Pembahasan

## Struktur Birokrasi

**Standar Operasional Prosedur (SOP)** Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sugihwaras bahwa Standar Operasional Prosedur sudah dibuatkan oleh Sekretaris Desa dan di publish pada website Sistem Informasi Desa sebagai informasi Publik, Hal ini diperkuat oleh pernyataan ketua RT. 15 yang mengatakan bahwa pernah melihat beberapa SOP yang ada di Website SID. Sehingga peneliti mengambil kesimpulan bahwa Standar Operasional Prosedur sudah ada dan memadai sesuai regulasi, namun kami menemukan bahwa SOP mengacu pada Komisi Informasi (KI) dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) yang berpatokan pada Regulasi terkait dengan kebijakan Informasi Publik.

**Fragmentasi** untuk melihat fragmentasi berjalan dengan baik adalah dengan cara bagaimana pemangku kebijakan membagi tugas sesuai dengan bidangnya, Pada pemerintah Desa Sugihwaras terlihat dengan jelas bahwa yang ditunjuk sebagai operator SID sudah memenuhi Tugas, pokok dan fungsi sesuai regulasi yang ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala desa sugihwaras yang menyampaikan bahwa untuk memunculkan kerjasama dibutuhkan pembagian tugas sesuai dengan kompetensi perangkat desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Rivaldo Yetta, 2022) dengan judul "Implementasi Kebijakan Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Utara" Fragmentasi, atau pembagian tanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan Sistem Informasi Desa, adalah langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah desa.

# Kesimpulan

- Dari Segi Komunikasi, terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki seperti pada dimensi transmisi dan konsistensi, perlunya komunikasi dan sosialisasi dari pemangku kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah Desa Sugihwaras selaku Implementator kebijakan.
- Dari Dimensi Sumber Daya, Terlihat sangat baik dan semuanya sudah memadai baik dari Segi Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana. Akan tetapi perlu adanya honor operator untuk menaikkan motivasi Operator Sistem Informasi Desa.
- Pada Disposisi, terlihat sudah cukup baik dan mengacu pada regulasi yang ada. Namun kendala yang ada hanya dari kurangnya pemahaman Kaur TU & Umum sebagai Operator SID terkait dengan fitur dan menu pada Sistem Informasi Desa pada saat Sekretaris Desa banyak kesibukan.
- Dimensi Struktur Birokrasi, Pemerintah Desa Sugihwaras sudah sangat baik dengan menyediakan Standar Operasional Prosedur secara mandiri dan mengacu pada regulasi Komisi Informasi dari Diskominfo. Selain itu dimensi Fragmentasi sudah sesuai dengan pemberian tugas kepada perangkat desa yang berkompeten.

# Referensi

- [1] E. dkk, Jamli, *Kewarganegaraan*,. Jakarta,: Bumi Aksara, 2005.
- [2] Mustafa Kassim Kipingu and Deodatus Patrick Shayo, “Technology and Immigration System: A New Paradigm for Improving Government Service Delivery in Tanzania,” *PanAfrican Journal of Governance and Development (PJGD)*, vol. 2, no. 2, 2021, doi: 10.46404/panjogov.v2i2.3231.
- [3] Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021, *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Indonesia, 2021.
- [4] Ariani Pujilestari and Irfan Ridwan Maksum, “Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Niara*, vol. 15, no. 2, 2022, doi: 10.31849/niara.v15i2.9942.
- [5] S. Budi Satriyo, Bambang Kurniawan, and R. Asti Aulia, “Implementasi Aplikasi PANGKAS (Gampang Ngurus Berkas) Pada Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang,” *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, vol. 1, no. 2, 2021, doi: 10.30656/jika.v1i2.4246.
- [6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2022, *Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*. Indonesia, 2022.
- [7] N. Amiril and I. Herawati, “Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen ANALISA STRATEGI PENGEMBANGAN DESA DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI SIDOARJO,” 2023.
- [8] Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, *Tentang Satu Data Indonesia*. Indonesia, 2019.
- [9] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. . Indonesia, 2018.
- [10] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018, *Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo*. Indonesia, 2018.
- [11] Ach. Karimullah, R. R. Maulany, and M. Amiruddin, “Problematika Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Indonesia,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 04, 2022, doi: 10.15642/mal.v3i04.134.
- [12] Ahmad Sunaryo and Imam Rosidi, “Efektifitas Media Website Dalam Peningkatan Pelayanan Publik,” *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.53429/j-kis.v1i2.186.

# Referensi

- [13] A. Sucipto *et al.*, “PENERAPAN SISTEM INFORMASI PROFIL BERBASIS WEB DI DESA BANDARSARI,” *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, vol. 3, no. 1, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1512.
- [14] A. Ridho Saqi, an Yuliansyah, and D. Arlupi Utami, “Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Melalui Aplikasi SID (Sistem Informasi Desa) Di Desa Gading Watu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Implementation of Public Services Based on E-Government Through the SID Application (Village Information System) Application in Gading Watu Village Menganti Sub-District, Gresik Regency,” vol. 1, no. 4, pp. 2023–2040, 2023.
- [15] D. A. Sindiana and I. Rodiyah, “Implementation Of A Website Based Village Information System In The Dukuhsari Village Government Jabon Distric [Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon],” 2023.
- [16] T. Hariono, C. Putra, and M. W. Chabibullah, “Penerapan Website Opensid untuk Menginformasikan Profil dan Potensi Desa Banjarsari,” *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BIDANG INFORMATIKA*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [17] Moleong, “Moleong,” *Fenomena Penelitian*, vol. Bab iii me, no. April 2021, 2017.
- [18] M. B. Miles and A. M. Huberman, “An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis Second Edition,” *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 1304. 2014.
- [19] N. Amiril, S. Suprihatin, and A. A. P. Nawanto, “SOLUSI PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN KEUANGAN di PEDESAAN MELALUI BUMDES SUKSES BERSAMA SUGIHWARAS,” *Neraca: Jurnal Ekonomi ...*, 2023.
- [20] L. Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi),” *Alfa Beta*, 2016.
- [21] R. Fatharani, R. Dwiyan, and M. Revansyah, “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Giriharja Kecamatan Rancah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2022.
- [22] C. Lubis, L. Nugroho, T. Fitrijanti, and C. Sukmadilaga, “Peluang Pengusaha Mikro dan Kecil (UMK) Menggunakan Layanan Digital Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *JURNAL AL-QARDH*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: 10.23971/jaq.v5i1.1769.
- [23] U. Arifah, “Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik,” *Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang 17*, 2018.
- [24] D. Setyawan and N. B. Srihardjono, “Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang,” *Jurnal Reformasi*, vol. 6, no. 2, 2016.
- [25] R. Yetta, A. Kabupaten, B. Kepulauan, P. Sulawesi, T. Studi, and K. Publik, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH,” 2022.

TERIMAKASIH  
WASSALAMUALAIKUM WR WB